



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUNG KB OLEH DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KABUPATEN TASIKMALAYA

Basuki Rahmat¹, Eva Sri Sugiarti R²
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya
ukitasik@gmail.com, evisugarti@gmail.com

Received: 07-02-2021
Revised : 16-02-2021
Accepted: 22-02-2021

Abstract

The Village Family Planning Policy is one of the development priorities announced by the Government, with the aim of improving the welfare of families and communities. The implementation of the Family Planning Village policy is under the authority of Bk-Family PlanningN, and in its implementation, it must work together with cross-sectors. The Health Office, through the Population and Family Planning Control Division, is one of the related agencies in achieving the success of the Family Planning Village program in Tasikmalaya Regency. The Family Planning Village Program in Tasikmalaya Regency thrives, however, out of a large number, only a few Family Planning Villages are able to develop in achieving their policy goals. As for this research, it is the implementation of the Village Family Planning policy in Tasikmalaya Regency. The purpose of this study is to analyze in depth the inhibiting and supporting factors in achieving the success of the implementation of the Family Planning Village program in Tasikmalaya Regency. The research methodology used is qualitative research, with the aim of analyzing the social phenomena that occur in the implementation of the policy on Family Planning Village in Tasikmalaya Regency. Sources of data were obtained by conducting interviews with officials and people who were directly or indirectly involved in the implementation of the Family Planning Village program. Based on the results of this study, it shows that the implementation of the Village Family Planning policy by the Tasikmalaya District Health and Population Control Office has not been able to achieve the goal. Inhibiting factors in achieving the success of the Family Planning Village program in Tasikmalaya Regency include the lack of family and community participation, as well as support for infrastructure and adequate budget to carry out various programs contained in the Family Planning Village.

Keyword : Policy implementation and Family Planning Village

Abstrak

Kebijakan Kampung KB merupakan salah satu prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah, dengan

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan Kampung KB merupakan kewenangan BkkBN, dan dalam pelaksanaannya harus bersinergi dengan lintas sektor. Dinas Kesehatan melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana salah satu instansi terkait dalam mencapai keberhasilan program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya. Program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya tumbuh subur, namun demikian dari jumlah yang banyak hanya beberapa Kampung KB yang mampu berkembang dalam mencapai tujuan kebijakannya. Adapun yang menjadi penelitian ini yaitu implementasi kebijakan Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam mencapai keberhasilan dari pelaksanaan program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya. Metodologi penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian kualitatif, dengan tujuan menganalisis fenomena sosial yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tentang Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya. Sumber data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pejabat dan orang-orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan program Kampung KB. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan Kampung KB oleh Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya belum dapat mencapai tujuan. Faktor penghambat dalam mencapai keberhasilan program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya kurangnya partisipasi keluarga dan lingkungan masyarakat, serta dukungan sarana prasarana serta anggaran yang memadai untuk melaksanakan berbagai program yang termuat dalam Kampung KB.

Keywords: Implementasi kebijakan dan Kampung KB.

Corresponden Author : Basuki Rahmat

Email : ukitasik@gmail.com



PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk masih terjadi setiap tahun di Indonesia, hal tersebut berbanding terbalik dengan negara-negara maju yang justru jumlah penduduk aslinya berkurang, dimana diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik mencapai 271 juta jiwa (Ahmad, 2019). Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai program dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, agar tidak terjadi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Saat ini telah tumbuh kembang program Kampung KB di seluruh nusantara, semenjak dideklarasikan oleh Presiden RI tahun 2016.

Perkembangan Kampung KB sampai saat ini telah berkembang cukup pesat, tercatat sampai tahun 2020 ini sebanyak 7.726 Kampung KB di seluruh Indonesia. Adapun yang menjadi dasar dari adanya program Kampung KB, yaitu UU Nomor 52 tahun 2009, mengenai Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Ramadhani, 2020). Penyelenggaraan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dicanangkan merupakan tugas dari BKKBN, yang tidak saja memiliki tugas pokok dalam Pengendalian Kependudukan, tetapi juga mengenai pembangunan keluarga dalam masyarakat sendiri.

Sebagai upaya penguatan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, BKKBN harus mampu melaksanakan penyusunan kegiatan secara nyata untuk memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sebagai jawaban atas masalah dalam penanggulangan penduduk dan program pembangunan keluarga, maka terbentuklah yang namanya program Kampung KB, sebagai salah satu solusi, dan diharapkan dalam pelaksanaannya melalui program Bangga Kencana maka program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terintegrasi dan simultan.

Program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan, yaitu pembangunan yang diawali dari pinggiran sebagai upaya memperkuat kampung dan desa sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemajuan sebuah kampung akan berdampak terhadap kemajuan desanya, sehingga cukup beralasan pelaksanaan pembangunan memulainya dari pinggiran atau kampung yang tesebesar diseluruh pelosok negeri. Kemajuan semua desa, tentu akan berdampak terhadap kemajuan bangsa, sehingga saat ini pembangunan desa juga secara terus menerus menjadi perhatian melalui program dana desanya (Suleman et al., 2020).

Pembentukan Kampung KB yang terus berjalan saat ini pada prinsipnya sebagai wujud sinergi antara beberapa kementerian terkait mulai dari pemerintah pusat dengan daerah, mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya, serta adanya peran serta secara langsung dari masyarakat. Program Kampung KB menjadi miniatur atau gambaran dari kehidupan sebuah desa tentang adanya keterpaduan pembangunan kependudukan (Afidah, 2020), Keluarga Berencana dan Bina Lingkungan yang sekaligus disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Keberadaan Kampung KB saat ini dijadikan sebagai wahana bagi pemberdayaan masyarakat, dengan berbagai program yang diarahkan kepada upaya adanya perubahan sikap, perilaku dan pola pikir (*mindset*) masyarakat ke arah yang lebih baik (Pertwi, Dirlanudin, & Supriadi, 2018), sehingga desa yang sebelumnya tertinggal dapat disamakan dengan desa yang lebih dulu maju, dengan salah satunya mengikuti suatu program keluarga yang sebelumnya tidak memiliki usaha dapat mengikuti UPPKS atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang ada.

Program Bangga Kencana secara prinsip menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, yaitu melalui pelaksanaan delapan fungsi keluarga, yaitu delapan fungsi keluarga meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi social budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan. Pelaksanaan fungsi keluarga ini membantu keluarga menjadi lebih bahagia dan sejahtera, bebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan (Aji & Yudianto, 2020).

Program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya menjadi tugas dan kewenangan dari Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk. Dari data yang diperoleh, Kampung KB yang ada di Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 384 Kampung KB, dengan klasifikasi Dasar sebanyak 373 Kampung KB, dalam kategori Berkembang sebanyak 11 Kampung KB. Berdasarkan data perkembangan program Kampung KB di Kabupaten

Tasikmalaya di atas, menunjukkan perkembangan Kampung KB belum efektif, dari hasil peninjauan sementara adanya beberapa gejala sebagai berikut:

1. Program pembentukan Kampung KB masih kurang berjalan secara maksimal, hal tersebut diduga terkait dengan target sasaran yang kurang tepat berdasarkan data yang ada, untuk menentukan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Kampung KB secara berkelanjutan.
2. Pembagian kewenangan dalam program Kampung KB belum berjalan dengan dengan baik, peranan aktif lintas sektor dan lintas program masih kurang, mulai peran dari Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dengan pihak Kecamatan dan dengan Pemerintahan Desa sendiri dalam melaksanakan program Kampung KB.
3. Tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat masih kurang, sebagai contoh masyarakat kurang aktif terlibat secara langsung dan ikut andil dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program kegiatan yang ada dalam program Kampung KB di wilayahnya.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul penelitian: “Implementasi Kebijakan Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya”. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang Implementasi Kebijakan Kampung KB oleh Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Pengertian metode kualitatif (Creswell, 2014, p. 4) mengutarakan: “Metode kualitatif adalah metode untuk menggali dan menegerti arti perorangan atau anggota tertentu yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.

Penetapan narasumber dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan cara purposive, hanya orang atau pihak tertentu yang akan menjadi sasaran peneliti dan sumber informasi. Informan penelitian antara lain Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, Kepala Seksi Bina Jaminan Pelayanan KB dan Hak-hak Reproduksi, Kepala Seksi Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat, Kepala Seksi Advokasi, KIE, Penggerakan dan Pengolahan Data, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Penyuluh KB (PKB), Pokja Kampung KB, Pengurus Kampung KB, dan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), dan Masyarakat. Data diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu dilakukan lewat informasi dikumpulkan melalui buku-buku yang relevan terkait dengan penelitian, dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, peraturan perundang-undangan, pencarian di internet, dan sumber lain terkait penelitian yang sedang berlangsung. Studi lapangan , yaitu mengamati dan mengumpulkan data langsung ke lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan data di lapangan, periode Januari sampai dengan Oktober 2020, terdapat data-data pasangan usia subur dan peseta KB Aktif di Kabupaten Tasikmalaya, yang disajikan dalam tabel berikut:

NO	Bulan	PUS	TIDAK BER- KB				Unmet Need		PA	CU/PUS	
			Hamil	IAS	IAT	TIAL	Total	IAT +TIAL			%
1	Januari	360.571	17.008	48.339	23.308	20.741	109.396	44.049	12,22%	252.124	69,92%
2	Februari	349.766	16.774	43.385	22.541	21.114	103.814	43.655	12,48%	245.952	70,32%
3	Maret	372.539	16.980	43.023	22.545	22.800	105.348	45.345	12,17%	267.191	71,72%
4	April	356.194	16.831	42.055	22.410	22.539	103.835	44.949	12,62%	252.359	70,85%
5	Mei	359.727	17.245	44.052	21.817	21.518	104.632	43.335	12,05%	255.095	70,91%
6	Juni	358.613	17.606	43.265	21.897	20.707	103.475	42.604	11,88%	255.138	71,15%
7	Juli	352.961	17.122	42.497	21.393	20.895	101.907	42.288	11,98%	251.054	71,13%
8	Agustus	348.751	17.091	42.643	21.805	20.961	102.500	42.766	12,26%	249.835	71,64%
9	September	351.088	17.148	41.893	21.951	22.336	103.328	44.287	12,61%	247.760	70,57%
10	Oktober	355.417	17.298	41.016	21.997	22.945	103.256	44.942	12,64%	252.161	70,95%

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya, 2020.

Unmet need KB merupakan kelompok wanita yang sudah tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilannya sampai dengan 24 bulan namun tidak menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilannya. Unmet need KB merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan data di atas menunjukkan kelompok usia subur yang masuk dalam kategori Unmet Need masih cukup besar, hal tersebut menunjukkan peran Kampung KB belum berjalan dengan baik dalam mencapai tujuannya salah satunya dalam memberikan edukasi pentingnya masuk dalam program KB.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah 384 Kampung KB, masuk dalam klasifikasi Dasar sebanyak 373 Kampung KB, kategori Berkembang sebanyak 11 Kampung KB. Dari temuan tersebut menunjukkan masih banyak Kampung KB yang keberadaannya belum meningkatkan perannya, hanya sebatas nama masuk dalam program Kampung KB.

Deskripsi Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya

Kampung KB dibentuk atas dasar adanya kesatuan wilayah setingkat desa yang memiliki kriteria tertentu dan terdapat keterpaduan antara program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Konsep Kampung KB, yang digagas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.

Konsep Kampung KB

Adapun skema yang dibangun dalam pembentukan Kampung KB, digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Utama Kampung KB

Kampung KB gagasan utamanya sebagai salah satu upaya dalam bidang pembangunan dan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, dimana melalui program Kampung KB dapat lebih mendekatkan dan menyentuh secara langsung serta memberi manfaat kepada masyarakat melalui program-program yang dibuat Pemerintah. Kampung KB menjadi salah satu prioritas pembangunan keluarga, dan dikembangkan sebagai strategi untuk mendukung Nawa Cita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memprioritaskan daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI dan Nawa Cita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Endah & Kholiq, 2019). Tujuan umum program Kampung KB yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas (Yunas & Nailufar, 2019).

Setiap program memiliki target yang harus dicapai, demikian juga dengan program Kampung KB. Target pencapaian dari adanya program Kampung KB, digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Target Pencapaian Kampung KB

Program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya, sampai saat ini telah terbentuk sebanyak 384 Kampung KB, dari jumlah tersebut sebanyak 373 masuk dalam klasifikasi Dasar, sedangkan sebanyak 11 Kampung KB masuk dalam kategori Berkembang atau baru mencapai 2,9%. Perkembangan Kampung KB yang masih kurang tersebut menunjukkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat keberhasilan dilihat dari beberapa aspek yang peneliti tanyakan kepada pelaksana kebijakan dan penerima manfaat program.

Implementasi Kebijakan Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya

Kampung KB merupakan salah satu inovasi strategis yang harus mampu melaksanakan kegiatan pembangunan prioritas seperti program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi. Kampung KB merupakan episentrum seluruh program KKBPK yang melibatkan seluruh wilayah, dimana BKKBN bersinergi dengan kementerian/lembaga, pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah (Nugroho, 2017). Kampung KB merupakan tempat yang dijadikan sasaran untuk mengintegrasikan program dan kegiatan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan atau sederajat agar dapat memperoleh manfaat dari pembangunan, sehingga keberadaan Kampung KB bisa membawa manfaat bagi masyarakat sekitar (Sumeru, 2016).

Adapun yang menjadi sasaran dari program Kampung KB yaitu Keluarga, Remaja, Penduduk Lanjut Usia (Lansia), Pasangan Usia Subur (PUS), Keluarga dengan balita, Keluarga dengan remaja, Keluarga dengan lansia, dan sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, dengan menyatakan:

“...keberadaan Kampung KB dari kebijakannya telah memuat secara jelas sasarannya, hanya saja dalam pelaksanaannya, tidak semua kelompok sasaran dapat mengikutinya secara aktif, meskipun di Kabupaten Tasikmalaya telah banyak berdiri Kampung KB”.

Program Kampung KB merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sasaran dalam program Kampung KB telah termuat secara jelas, namun demikian dalam pelaksanaannya masih kurang mendapatkan dukungan dari target sasaran, terutama dari kalangan remaja dan pasangan usia subur.

Keberhasilan sebuah program tentu harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk target atau sasaran yang tertuang dalam sebuah kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Seksi Bina Advokasi, Komunikasi, Informasi Edukasi, Penggerakan dan Pengolahan Data, dari hasil wawancara memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“...kalau sasarannya sudah jelas, namun demikian masih perlu adanya advokasi kepada semua kelompok sasaran, agar mendapatkan pengetahuan dan dapat ikut serta secara aktif dalam berbagai program yang ada dalam kegiatan Kampung KB, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai”.

Kebijakan dibuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi, dalam ruang lingkup kebijakan publik, kebijakan tentang pembentukan Kampung KB merupakan salah satu solusi untuk lebih mendekatkan program Pemerintah

untuk memberdayakan masyarakat untuk mencapai keluarga kecil dan bahagia. Berdasarkan hal tersebut tentu diterbitkannya sebuah kebijakan oleh Pemerintah akan memiliki maksud dan tujuan, serta sasarannya, sehingga akan sangat jelas dalam mengimplementasikannya.

Tujuan dan sasaran yang sudah jelas yang tertuang dalam isi kebijakan, belum tentu dapat mencapai hasil yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Dari hasil data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukan Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya telah berdiri cukup banyak, namun demikian dalam pelaksanaan program-programnya belum berjalan dengan cukup baik. Pandangan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Seksi Bina Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, dimana dari hasil wawancara memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“...pada dasarnya program Kampung KB memiliki dasar hukum yang kuat, dimana sasarannya juga sudah cukup jelas, namun demikian dalam pelaksanaannya masih kurang mendapat antusias dari kelompok sasarannya, masih diperlukan adanya sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan sasaran program telah termuat dalam isi kebijakan secara jelas. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi focal point pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat pencapaian kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan kapasitas sumber daya alam dan kapasitas lingkungannya.

Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah penduduk yang cukup besar, satu sisi merupakan aset dalam pembangunan, namun demikian dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah akan berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan adanya upaya-upaya yang lebih nyata dari semua stakeholder untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Keberadaan program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya belum sepenuhnya memiliki dampak terhadap tujuan kebijakan, hal tersebut diperkuat kembali sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bina Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“...program Kampung KB telah memiliki sasaran yang sangat jelas, namun demikian masih belum berjalan secara efektif, sehingga masih diperlukan adanya sosialisasi dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan program-programnya”.

Kebijakan terkait dengan Program Kampung KB dalam penjelasannya telah memuat tentang sasaran atau targetnya, sebagaimana telah dijelaskan di muka, belum teralisasinya tujuan kebijakan dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat, bisa dari target atau sasarannya sendiri, atau dari para implementor kebijakan yang kurang memberikan sosialisasi, advokasi kepada kelompok sasaran. Lembaga dan instansi terkait harus terus melakukan sosialisasi dan advokasi kepada kelompok sasaran agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara maksimal.

Sebaik apapun kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, tanpa adanya dukungan kuat dari para pelaksana kebijakan, tujuan kebijakan tidak mungkin tercapai sesuai dengan yang diharapkan. BKKBN selaku badan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program perlu melakukan berbagai upaya agar yang menjadi sasaran kebijakan berperan aktif dalam melaksanakan program yang dicanangkan. Tujuan utama kebijakan program Kampung KB sebagaimana telah dijelaskan di muka, yaitu untuk membangun masyarakat kecil yang berkualitas dan sejahtera lahir dan batin.

Berdasarkan kajian ini menunjukan kebijakan tentang program Kampung KB telah memuat sasaran yang telah ditetapkan, yaitu keluarga, pasangan usia subur (PUS), lansia,

remaja, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, lansia (Pramaista, 2019). Dalam implementasinya belum sepenuhnya kelompok sasaran dapat ikut secara aktif dalam program Kampung KB yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga diperlukan kembali oleh para pelaksana di lapangannya melalui sosialisasi, advokasi kepada kelompok sasaran agar dapat berperan aktif dalam program-program yang diselenggarakan oleh Kampung KB yang ada di wilayahnya. Keberhasilan sebuah kebijakan diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi diantara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik, dan tanpa adanya dukungan dari sasaran kebijakan maka tujuan kebijakan tidak akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan pembuat kebijakan.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya Program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya

Kampung KB merupakan upaya Pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keluarga terutama di pedesaan, masyarakat miskin, daerah padat penduduk, daerah tertinggal, masyarakat yang berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan terpencil, serta daerah penangkapan ikan di seluruh nusantara. Kampung KB merupakan salah satu kegiatan yang menjadi prioritas di bawah arahan Presiden Republik Indonesia, khususnya sebagai salah satu bentuk investasi dalam program KB yang dapat dinikmati masyarakat secara langsung. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi antar departemen, terutama dalam keterpaduan kegiatan yang dilakukan di Kampung KB. Kampung KB merupakan salah satu inovasi strategis untuk melaksanakan kegiatan prioritas seluruh program KKBPK di lapangan. Kampung KB dilaksanakan di tingkat pemerintahan paling bawah, melibatkan seluruh sektor di lingkungan BKKBN, bersinergi dengan pemangku kepentingan kementerian/lembaga, mitra kerja dan instansi terkait, yang tergantung kepada kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Landasan pelaksanaan program Kampung KB yaitu UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB, dimana programnya merupakan salah satu tugas BKKBN yang berkoordinasi dengan instansi terkait yang ada di daerah, salah satunya Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Dinas Kesehatan melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tugas pokoknya melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan pelaksanaan keluarga berencana di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Sebagai penanggungjawab dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sudah barang tentu memahami tentang program Kampung KB yang telah menjadi prioritas pembangunan di bidang kependudukan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dengan adanya program Kampung KB, dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, menyatakan:

“ didirikannya Kampung KB memiliki manfaat yang sangat besar terutama memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas, melalui program kependudukan, keluarga berencana, bina lingkungan, dan pengembangan sektor terkait untuk kehidupan masyarakat di perkamungan, jadi tidak fokus pada program KB semata”.

Kampung KB merupakan inovasi strategis dalam memperkuat program KKBPK dan mengembangkan sektor terkait di semua tingkat daerah, khususnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memperluas cakupan pengembangan program KKBPK yang dapat diterima. Diharapkan sebagai langkah untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang cukup kuat, dengan memanfaatkan potensi masyarakat secara langsung

Pandangan selanjutnya tentang manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dikemukakan oleh Pemegang Program Kampung KB tingkat Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, dimana dari hasil wawancara dengan beberapa pemegang program Kampung KB, umumnya menyatakan adanya manfaat yang baik dari adanya program Kampung KB, karena dengan program tersebut tidak hanya sebatas kepada pengendalian penduduk dan alat-alat reproduksi, tetapi lebih luas menyangkut bagaimana membangun keluarga sehat dan sejahtera.

Demikian halnya dengan beberapa pendapat yang ditemui kepada para Pengurus Kampung KB yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, dimana pada umumnya merasakan adanya manfaat terhadap program yang digulirkan. Namun demikian sebagian besar pengurus Kampung KB mengemukakan masih kurang aktifnya masyarakat dalam melaksanakan berbagai program yang ada dalam program Kampung KB, sehingga beberapa program yang digalakan kurang berjalan dengan baik.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh masyarakat dan masyarakat mengenai manfaat adanya Kampung KB, sebagian besar mengemukakan ada manfaat yang dirasakan, tetapi dalam pelaksanaannya kurang maksimal, dikarenakan masyarakat belum aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dicanangkan pengurus Kampung KB, sehingga masih belum maksimal, berbeda dengan Kampung KB yang sudah berjalan dengan baik, dimana beberapa Kampung KB yang sudah masuk dalam kategori berkembang, telah mampu memberikan manfaat yang cukup besar, baik dari segi peningkatan ekonomi keluarga, masyarakat dan berbagai kegiatan yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas menunjukan ada umumnya telah memahami manfaat terhadap adanya program Kampung KB sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung yang merupakan wilayah terkecil dalam pemerintahan desa. Kampung KB tidak saja sebagai upaya pengendalian penduduk dan masalah-masalah reproduksi keluarga, tetapi lebih kepada meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perkonomian. Stabilisasi dan peningkatan ekonomi keluarga tidak harus selalu berpenghasilan tinggi, tetapi keseimbangan antara pengeluaran yang tidak melebihi pendapatan, menggali sumber daya ekonomi baik bagi individu, keluarga maupun kelompok masyarakat, serta mengurangi beban ketergantungan.

Manfaat lain melalui adanya kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam program KKBPK yaitu penguatan kewirausahaan, permodalan, produksi dan pengemasan, pemasaran, kemitraan, dan UPPKS (upaya peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga) dikemas kemandirian keluarga miskin. Ketahanan keluarga harus diawali dengan kualitas setiap keluarga yang dimulai dari ayah, ibu, anak, dan keluarga lainnya yang memiliki nilai moral, dan tentunya dengan pendidikan agama yang kuat yang dilakukan dalam keluarga dan masyarakat. Harus dilandasi dengan pemahaman yang paling mendasar tentang pentingnya ketahanan keluarga yang kuat, karena keluarga merupakan penentu dalam mencapai kesejahteraan suatu kelompok dan masyarakat secara luas.

Perubahan yang Terjadi Setelah Adanya Program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya

Kebijakan pemerintah dalam membangun masyarakat melalui program Kampung KB sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya adanya perubahan-perubahan mendasar sebagai program pembangunan dari unsur terkencil, yaitu keluarga. Kampung KB digunakan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, dan diperlukan adanya komitmen kuat diantara pelaksana kebijakan untuk mewujudkan harapan-harapan yang terkandung di dalamnya, dan diperlukan adanya keuletan, kesabaran, kebersamaan, dan kerja keras yang benar-benar berlaku dilingkungan masyarakat. Membangun masyarakat dari

lingkungan melalui pendekatan persatuan bukan hanya sekedar harapan, melainkan bagaimana memposisikan program Kampung KB sebagai upaya membangun kesejahteraan dengan prioritas masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah.

Program Kampung KB merupakan salah satu bentuk revolusi spiritual yang mempersiapkan generasi muda untuk menikmati bonus demografi dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Talenta yang berkualitas hanya bisa tercipta jika berkompeten, mendapatkan pembinaan yang serius, dan diharapkan dapat memulai perubahan positif dari adanya Kampung KB (Purnawanto, 2010). Program harus dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga Kampung KB dapat menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Apapun program yang dibuat, sulit bagi program Kampung KB untuk berhasil kecuali jika masyarakat merasa perlu dan memiliki.

Pandangan tentang perubahan yang terjadi dengan adanya Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya, dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dimana dari hasil wawancara memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“...perlahan tapi pasti program Kampung KB dapat memberikan perubahan-perubahan terhadap peningkatan kehidupan dalam keluarga dan masyarakat, kita sudah berusaha melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaksana di lapangan dan masyarakat secara langsung untuk memajukan Kampung KB di tiap wilayahnya masing-masing”.

Pembentukan Kampung KB didirikan di tingkat Dusun, RW, atau unit wilayah setingkat, dimana dalam kegiatannya terintegrasi dengan program pembangunan antara kependudukan, keluarga berencana, program bina keluarga dan pembangunan sektor terkait lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Perubahan-perubahan yang diharapkan dapat benar-benar terwujud sebagai upaya membangun bangsa yang dimulai dari keluarga, sebagai lingkungan terkecil, dusun dan desa sampai ke tingkat daerah. Setiap kebijakan cenderung memiliki dampak positif, namun demikian dalam implementasinya akan ada hambatan-hambatan dan kendala-kendala disamping adanya dukungan dalam mencapai keberhasilannya.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Kepala Seksi Bina Advokasi, Komunikasi, Informasi Edukasi, Penggerakan dan Pengolahan Data, dimana hasil wawancara mengenai perubahan yang diharapkan dengan adanya Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya memberikan pandangannya sebagai berikut:

“...tentu saja dengan adanya Kampung KB diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja terkait dengan pengendalian penduduk dan berbicara masalah kontrasepsi, tetapi lebih bagaimana agar kehidupan masyarakat dalam meningkat, dan perlahan-lahan program yang dijalankan dapat diterima oleh masyarakat, meskipun masih perlu adanya edukasi melalui sosialisasi dan menggerakkan tokoh-tokoh masyarakat agar terlibat aktif dalam program Kampung KB”.

Sasaran kegiatan kegiatan pengelolaan Kampung KB selain keluarga, pasangan usia subur (PUS), lansia, remaja, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, lansia. Sasaran sektoral disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing, namun pelaksanaannya adalah kepala desa/kelurahan, ketua RW, ketua RT, petugas lapangan bidang terkait, tim penggerak PKK, pengurus institusi masyarakat perdesaan setempat di tingkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kepemudaan dan pelaksana pembangunan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menjadi landasan pelaksanaan program, tidak hanya berfokus pada masalah pengelolaan kependudukan, tetapi juga pada masalah

pembangunan keluarga, serta kependudukan nasional dan keluarga berencana, yang dijalankan oleh BKKBN. Dalam rangka penguatan program KKBPK, BKKBN beserta lintas sektor diharapkan mampu mengembangkan kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian tujuan atau sasaran yang secara langsung menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Bina Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi, dari hasil wawancara memberikan pandangannya terkait perubahan dengan adanya program Kampung KB dengan mengemukakan:

“.....tentunya dengan adanya KB Kampung diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dalam membahas masalah pengendalian kependudukan dan kontrasepsi, tetapi juga dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui sosialisasi dan mobilisasi tokoh masyarakat agar lebih aktif dalam berbagai program yang dijalankan, serta meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat”

Berdasarkan pandangan di atas dalam pelaksanaan Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya telah adanya perubahan yang cukup baik, namun demikian masih perlu adanya pembinaan melalui edukasi, sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat dan pengurus Kampung KB mampu memiliki kemampuan dalam pengelolannya sesuai dengan tujuan dibentuk dan didirikannya Kampung KB. Pada kenyataannya cukup banyak Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya, tetapi yang berkembang hanya sedikit, sehingga para pelaksana kebijakan harus berusaha untuk meningkatkan setiap Kampung KB yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

Dipertegas kembali oleh Kepala Seksi Bina Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat, dari hasil wawancara berkaitan dengan perubahan yang diharapkan dengan adanya Kampung KB, memberikan pandangannya sebagai berikut:

“.....setelah terbentuknya Kampung KB tentu diharapkan adanya perubahan-perubahan yang signifikan terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat setempat, namun demikian memang pada kenyataannya masih perlu pembinaan secara berkelanjutan sehingga tidak hanya nama saja, tetapi program-programnya tidak berjalan dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat setempat”

Keberhasilan dalam pelaksanaan program Kampung KB perlu adanya dukungan dari berbagai pihak. Partisipasi masyarakat dan berbagai lembaga sangat penting agar masyarakat dapat merasakan keberadaan Kampung KB di wilayahnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Perubahan yang diharapkan diantaranya yaitu meningkatkan kualitas keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), menurunkan kesuburan dengan pelayanan KB yang berkualitas. Penyelenggaraan Kampung KB perlu didukung lintas sektor, karena bukan hanya BKKBN termasuk Dinas Kesehatan yang bisa menangani pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga, disamping semua komponen masyarakat agar tujuan kebijakan tercapai.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, dari hasil wawancara memberikan pendapatnya dengan mengemukakan:

“.....kehadiran Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setingkat desa atau sederajat melalui pengembangan program KKBPK dan sektor lainnya untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, hal tersebut merupakan tujuannya, dan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya

masih perlu disosialisasikan terutama untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakatnya”.

Seberapa besar ketercapaian program kegiatan yang dirancang dalam Kampung KB, tentunya harus dilihat dari sumber daya yang dimilikinya. Program yang dicanangkan dapat menghasilkan sebuah perubahan sesuai dengan tujuan kebijakan apabila didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukungnya. Keberhasilan program tanpa adanya dukungan dari masyarakat sebagai penerima kebijakan, serta kurang adanya dukungan sarana dan prasarana serta komunikasi dengan para pemangku kebijakan, tentu akan sulit mencapai perubahan yang diharapkan.

Koordinasi dan komunikasi diantara pelaksana kebijakan harus berjalan dengan baik, mulai dari pihak BKKBN, Dinas Kesehatan dan pelaksana di lapangan dalam mewujudkan perubahan yang diharapkan dengan adanya program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Pemegang Program Kampung KB tingkat Kecamatan, setelah melakukan wawancara pada umumnya menyatakan telah terjadi perubahan-perubahan di masyarakat meskipun belum memiliki dampak besar, dikarenakan hanya beberapa Kampung KB yang benar-benar aktif dalam menjalankan program-programnya.

Sejalan dengan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Pengurus Kampung KB yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, terutama dari Kampung KB yang masih masuk dalam klasifikasi dasar, dimana masyarakat belum begitu antusias dalam melaksanakan beberapa program yang digulirkan oleh pengurus Kampung KB, sementara untuk sebagian kecil saja dari Kampung KB dimana masuk dalam klasifikasi berkembang telah secara aktif melaksanakan berbagai program yang direncanakan oleh pengurus KB atas arahan dan bimbingan instansi terkait.

Dari hasil wawancara yang ditemui dengan beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, yang masuk dalam program Kampung KB juga sebagian besar masih berpendapat belum memberikan pengaruh yang sangat besar, hal tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Kampung KB. Kurangnya dorongan dan edukasi pada masyarakat menjadikan masyarakat kurang memiliki antusias dan terlibat secara aktif dalam kepengurusan maupun terlibat dalam program kegiatan yang menjadi sasaran dan kegiatan Kampung KB yang ada diwilayahnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah disampaikan di muka, perubahan yang terjadi setelah adanya Program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya belum sesuai dengan yang diharapkan, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat aktivitas Kampung KB itu sendiri, sampai saat ini perubahan klasifikasi Dasar ke klasifikasi Kampung KB berkembang belum meningkat, sehingga masih diperlukan adanya bimbingan dan arahan kepada setiap pengurus Kampung KB untuk menggerakkan dan menjalankan program-program yang ada di dalam Kampung KB, sehingga benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dari adanya program Kampung KB. Diperlukan juga komitmen yang dikuat diantara para pelaksana kebijakan dan pengurus di tingkat kampung untuk tetap melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh setiap Kampung KB.

Pembahasan

Kebijakan tentang Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya, dari hasil penelitian menunjukkan pada umumnya masyarakat telah mengetahui tentang manfaat yang diperoleh dengan adanya Program Kampung KB, dimana dapat dilihat dari jumlah pendirian Kampung KB yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Namun demikian secara kuantitas menunjukkan semangat yang tinggi dalam mendirikan Kampung KB, tetapi

dalam pengelolaannya masih kurang, sehingga hanya sedikit sekali Kampung KB yang berkembang dengan baik.

Tujuan dari adanya Kampung KB tentu memberi harapan kepada keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, namun demikian dari beberapa capaian seperti tingkat kepesertaan KB juga belum mencapai target yang telah ditentukan. Masih diperlukan pendekatan-pendekatan budaya melalui tokoh masyarakat, tokoh keagamaan maupun dengan para pengurus di tingkat RT dan RW, agar masyarakat dapat terlibat secara langsung dengan program Kampung KB, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan lingkungan masyarakatnya.

Sejalan dengan yang disampaikan di muka, perubahan yang diharapkan dengan adanya program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya belum begitu memberikan dampak yang signifikan. Masyarakat kurang antusias dalam melibatkan diri dalam program-program yang diselenggarakan oleh Kampung KB, sehingga dalam perjalanannya, pelaksanaan dan pengelolaan Kampung KB kurang berjalan dengan baik, dan secara otomatis kurang memberikan dampak kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Kebijakan terkait dengan Kampung KB, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu melalui berbagai pemberdayaan maka akan dapat meningkatkan kehidupan keluarganya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan dari aspek ekonomi, kualitas sumber daya manusia belum berdampak signifikan, terlebih dari kemauan masyarakat dalam keterlibatan KB, dimana dari hasil penelitian ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Keberadaan program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya sebenarnya sangat baik dalam upaya mendukung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena Kampung KB tidak saja terkait dengan masalah-masalah lonjakan penduduk maupun penggunaan alat-alat kontrasepsi, tetapi lebih kepada bagaimana agar terciptanya keluarga kecil dan bahagia terwujud melalui beberapa program yang dilaksanakan dalam Kampung KB. Setiap keluarga dan masyarakat perlu lebih memahami tentang maksud dan tujuan dari adanya program Kampung KB, sehingga dengan lebih mengetahui dan memahaminya dapat secara aktif tergabung dalam Kampung KB yang ada di wilayahnya.

Dalam setiap kebijakan tentu ada perumus kebijakan, pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan serta sasaran kebijakannya. Pelaksana kebijakan terkait Program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya telah adanya keterlibatan lintas sektor, meskipun program Kampung KB merupakan kewenangan dari BKBBN, tetapi dalam pelaksanaannya telah melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sampai dengan pengurus Kampung KB sendiri.

Melihat sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan Program Kampung KB sebenarnya cukup tersedia, namun demikian sumber daya manusia, dalam hal ini di tingkat terkecil, yaitu keluarga dan lingkungan masyarakatnya yang masih kurang, sehingga program Kampung KB sebagian besar belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sementara dari aspek sarana dan prasarana masih perlu mendapatkan perhatian dari pemangku kebijakan ditambah dengan ketersediaan anggaran untuk mendukung operasionalisasi program-program yang ada di Kampung KB.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan yang secara khusus memiliki kewenangan dalam program kependudukan dan keluarga berencana, melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan advokasi, sosialisasi dan pembinaan terhadap keluarga, masyarakat dan pengurus Kampung KB agar mampu mengembangkan program-program yang dan termuat dalam program Kampung KB agar dapat memberikan manfaat pada keluarga dan lingkungan masyarakat. Strategi yang telah dilaksanakannya melalui workshop, pertemuan-pertemuan secara

langsung kepada masyarakat maupun dengan sosialisasi dengan melibatkan berbagai komponen didalamnya.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya ditentukan oleh sejauhmana minat dan kemauan dari kelompok sasaran, dalam hal ini keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan respon masyarakat masih kurang, meskipun secara kuantitatif jumlah Kampung KB banyak berdiri, tetapi hanya sedikit Kampung KB yang berkembang dan mampu memberikan manfaat bagi anggotanya. Diperlukan adanya upaya-upaya untuk lebih mendorong keluarga atau masyarakat untuk lebih aktif dan terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program Kampung KB, agar tujuan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dapat tercapai.

KESIMPULAN

Kebijakan program Kampung KB dari temuan secara umum menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui manfaat program Kampung KB, terlihat dari banyak berdirinya Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya, tetapi kekurangan dalam hal pengelolaannya. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat partisipasi dalam keluarga sehingga diperlukan adanya pendekatan budaya melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus tingkat RT dan RW agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam program Kampung KB, yang dapat membawa manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat.

Dari aspek perubahan yang diharapkan pada program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya ternyata belum berdampak signifikan, dikarenakan masyarakat kurang aktif mengikuti program-program yang disponsori Kampung KB. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya Kampung KB belum memberikan pengaruh yang signifikan secara ekonomi, serta kemauan masyarakat untuk ber-KB dimana hasil penelitian ini belum sesuai dengan yang diharapkan.

Kehadiran program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya sebenarnya sangat baik dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. KampungKB merupakan program yang dilaksanakan di beberapa KampungKB sekaligus masalah pertumbuhan penduduk dan penggunaan alat kontrasepsi. Seluruh keluarga dan masyarakat perlu lebih memahami maksud dan tujuan program Kampung KB.

Pelaksanaan kebijakan terkait program Kampung KB di Kabupaten Tasikmalaya yang berada di bawah kewenangan BKBBN dan telah dilaksanakan melalui keterlibatan lintas sektoral, untuk Dinas Kesehatan merupakan tugas dari Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana. Selanjutnya dari aspek sumber daya yang dimiliki oleh pelaksanaan program Kampung KB sebenarnya cukup tersedia, namun dalam hal ini program Kampung KB kurang berjalan dikarenakan faktor keluarga dan lingkungan masyarakat yang kurang berperan aktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah Kampung KB secara kuantitatif banyak berdiri, partisipasi masyarakat masih kurang, masih angat sedikit yang benar-benar berjalan dengan cukup baik. Diperlukan upaya untuk lebih mendorong keluarga dan masyarakat agar lebih aktif dan terlibat langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan di bawah program Kampung KB agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

BIBLIOGRAFI

- Afidah, N. N. (2020). Kampung keluarga berencana sebagai upaya mengubah paradigma mitos banyak anak banyak rezeki. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(2).
- Ahmad, A. (2019). Pemodelan Matematika Dengan Menggunakan Persamaan Diferensial Pada Pertumbuhan Penduduk di Indonesia. *PROSIDING SENDIKA*, 5(2).
- Aji, M. S., & Yudianto, G. P. H. (2020). Pemberdayaan Masyarakat “Kampung KB” Ditinjau dari Perspektif Ottawa Charter. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 8(2), 217–229.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Endah, K., & Kholiq, W. A. (2019). Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KBP3A) Dalam Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sejahtera (Studi Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 101–112.
- Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik. *Jakarta: Elex Media Komputindo*.
- Pertiwi, A. N., Dirlanudin, D., & Supriadi, O. (2018). *Analisis Swot Pengelolaan Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Kampung Kaso Desa Sukaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Pramaista, M. A. (2019). *Analisis masalah mursalah terhadap pelaksanaan pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program kampung KB menuju keluarga berkualitas di Kota Mojokerto*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Purnawanto, B. (2010). *Manajemen SDM berbasis proses*. Grasindo.
- Ramadhani, N. F. (2020). *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. UPN" VETERAN" JATIM.
- Suleman, A. R., Revida, E., Soetijono, I. K., Siregar, R. T., Syofyan, S., Hasibuan, A. F. H., ... Syafii, A. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis.
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47–56.
- Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2019). Collaborative Governance Melalui Program Kampung Kb Di Kabupaten Jombang. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 162–173.

Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya.